

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN TAHUN 2019



Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat : Jalan Melati Nomor 14 Kandangan 71211, Telpon/Fax (0517) 21094

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2019 adalah merupakan perubahan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 – 2023 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada Perubahan RENJA 2019 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA dengan tetap mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

RENJA merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Anggaran 2019. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Perubahan Renja SKPD tahun 2019 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Kandangan, 22 Juli 2019



Irfan H. SAIDINOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 19641215 199312 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2018	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan 2014-2018	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	24
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan	25
3.3. Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	27
BAB V PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	6
Tabel 2.2	Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2018-2023	13
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	14
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	19
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
Tabel 3.1	Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2019.....	25
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2019.....	29

-BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) merupakan perubahan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Perubahan Renja Dinas Perikanan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Perubahan Renja SKPD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti strategis Perubahan Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2019 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023;

3. Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten;
4. Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005
13. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2019 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2019 ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perikanan tahun 2019 dan menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2019 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
TAHUN 2018**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan 2014 – 2018.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kerja Dinas Perikanan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nama SKPD : Dinas Perikanan

						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2018	
Kode										Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
			0	0		NON URUSAN									
2	05	2	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	79	80	80	100			
2	05	2	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai perangko	2,296 lembar	1.686	260 lembar 50 lembar	310 lembar	100	310 lembar 50 lembar	2,296 lembar	100
2	05	2	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	jumlah rekening	20 rekening	12 rekening	4 rekening	4 rekening	100	4 rekening	20 rekening	100
2	05	2	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Kondisi kendaraan dinas/mobil laik pakai	121 unit	71 Unit	25 Unit	25 Unit	100	22 Unit	121 unit	100
2	05	2	05	01	07	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi	Jumlah kegiatan pameran dan pawai pembangunan	10 kegiatan	6 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	10 kegiatan	100
2	05	2	05	01	09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung/kantor dengan kondisi baik	156 unit	106 unit	25 unit	25 unit	100	25 unit	156 unit	100
2	05	2	05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan dalam 1 tahun	155 jenis	93 jenis	31 jenis	31 jenis	100	31 jenis	155 jenis	100
2	05	2	05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	20 jenis	12 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	20 jenis	100

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatas Tahun 2017			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2018	
											Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	05	2	05	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik kantor	35 jenis	21 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	35 jenis	100
2	05	2	05	01	13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	25 paket	15 paket	8 paket	8 paket	100	2 paket	25 paket	100
2	05	2	05	01	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar/Harian (SKH)	15 surat kabar Harian (SKH)	9 SKH	3 SKH	3 SKH	100	3 SKH	15 surat kabar Harian (SKH)	100
2	05	2	05	01	17		Penyediaan makan dan minum	Jumlah kegiatan rapat, tausiyah dan tamu	18 kegiatan	10 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	4 kegiatan	18 kegiatan	100
2	05	2	05	01	18		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	5 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	5 tahun	100
2	05	2	05	01	19		Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	65 orang	52 orang	7 orang	7 orang	100	7 orang	65 orang	100
2	05	2	05	01	20		Rapat rapat konsultasi dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten	5 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	5 tahun	100
2	05	2	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	79	80	80	100	81	81	100	

							Urusan/Bidang			Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegitan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatas Tahun 2017			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2018	
Kode			Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan										Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
2	05	2	05	02	22	Pemeliharaan berkala Gedung kantor	Jumlah gedung/kantor dengan kondisi baik	15 unit	11 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	15 unit	100			
2	05	2	05	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kondisi mobil/speedboat operasional laik jalan	34 unit	26 unit	2 unit	2 unit	100	6 unit	34 unit	100			
2	05	2	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur												
2	05	2	05	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	5 buah	1 buah	0 buah	0 buah	0	0	1 buah	20			
2	05	2	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	AKIP	BB	BB	BB	BB	100	BB	A	100			
2	05	2	05	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	114 laporan	104 laporan	5 laporan	5 laporan	100	6 laporan	114 laporan	100			
2	05	2	05			PILIHAN												
2	05	2	05			Kelautan dan Perikanan												
2	05	2	05	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Poduksi perikanan budidaya	4,355 Ton	4,290,4 Ton	3,959 Ton	4.106,2 Ton	103,72	4,355 Ton	4.572,79 Ton	105			
2	05	2	05	20	01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah benih ikan yang tersedia	4,178,000	3,000,000 benih	570,500 benih	570,500 benih	100	607.500 ekor	4,178,360	100			

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegitan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2018	
1		2		3		4				5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	05	2	05	20	03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah luasan media budidaya	0.0864 Ha	-	0,144	0,144	100	0.0864	0,0864	100	
2	05	2	05	20		Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)										
2	05	2	05	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase produksi perikanan lokal	8,708	8.225,4	8,454	8,490.04	100,43	8,708	9.056,43 Ton	104	
2	05	2	05	21	01	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan yang memiliki alat tangkap yang representatif	8,9 %					8,9 %	8,9 %	100	
2	05	2	05	16	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kelestarian Sumberdaya Kelautan	Jumlah Pokmaswas aktif	30 Pokmaswas	20	30	30	100	30	30	100	
							Persentase pengawasan terhadap daerah yang dijadikan ptensi perikanan tangkap	100%					100%	100%	100	
2	05	2	05	23		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase jumlah pelaku usaha yang aktif	15 %	-	10 %	10 %	100	15 %	15 %	100	
							Persentase Jumlah Pelaku Usaha yang Menggunakan Teknologi Hasil Perikanan	10 %	-	5 %	5 %	100	15 %	15 %	100	

2	05	2	05	23	02	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah pelaku usaha yang aktif	138 orang	-	-	-	-	12	120	86.96
							Jumlah pelaku usaha yang menggunakan teknologi hasil perikanan	89 orang	-	-	-	-	4	81	91.01
	3	01	01	23	01	Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	6 orang	-	-	-	-	6 orang	6 orang	100
							Jumlah pelaku usaha yang menggunakan teknologi hasil perikanan	4 orang	-	-	-	-	4 orang	4 orang	100
	3	01	01	23	03	Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	6 orang	-	-	-	-	6 orang	6 orang	100

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2018 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2) Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu:

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan:

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKD

4) Program Pengembangan budidaya perikanan dengan kegiatan:

- Pengembangan bibit ikan unggul
- Pembinaan dan pengembangan perikanan
- Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar

5) Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan:

- Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
- Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan dan kelestarian sumberdaya perikanan

6) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan dengan kegiatan:

- Pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan
- Pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tujuan dan sasaran Dinas Perikanan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan maka hubungan antara tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2018)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)
								2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	23,50	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	20,67	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
		Nilai/Predikat AKIP	A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	80,55 (A)	81,89 (A)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)
2	Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	9,07 %	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	%	3,73	5,46	6,56	8,64	8,9	9,07	9,07

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perikanan sesuai dengan Renstra Dinas Perikanan tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2019 berjalan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perikanan

No	Indikator	Target Renstra			Realisasi Capaian	Proyeksi	
		2018	2019	2020		2018	2019
1	Indeks Reformasi Birokrasi	20,67	23,50	23,50	20,67	23,50	23,50
	Nilai/predikat AKIP	BB	A	A	A	A	A
2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	3,73	5,46	6,56	3,73	5,46	6,56

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Tingkat Pelayanan Dinas Perikanan

Pembentukan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugasnya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Dinas Perikanan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menetapkan program kerja Dinas Perikanan sesuai dengan kebijakan teknis dinas;
3. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Perikanan Budidaya;
4. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Perikanan Tangkap;
5. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan;

6. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan budidaya;
3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan tangkap;
4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pengolahan dan pemasaran perikanan;
5. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan UPTD;
6. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Sehubungan dengan terpilihnya Kepala Daerah Hulu Sungai Selatan masa bakti 2018-2023, maka dokumen Renstra yang dipakai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini berdasarkan RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga Sasaran Strategis Dinas Perikanan terdapat 2 (dua) yakni :

1. Meningkatnya persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB.
 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Secara struktur organisasi, saat ini Dinas Perikanan telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan. Keberadaan Sekretariat dan tiga bidang (Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan) telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi dinas.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- 1) Permintaan produk perikanan yang masih terbuka luas dan terus meningkat,
 - 2) Perlu ditingkatkannya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 – 2023, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi: “Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”

Misi:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

- 1). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meliputi :
 - a. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan
 - b. Meningkatnya kualitas pendidikan
 - c. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
 - d. Meningkatnya kualitas kesehatan
 - e. Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman
 - f. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - g. Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat
 - h. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat

2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

- 1). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan, meliputi:
 - a. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah
 - b. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
 - c. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - d. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
 - e. Meningkatnya investasi PMDN
 - f. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

- 1). Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian, meliputi :
 - a. Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas
 - b. Meningkatnya sarana prasarana sosial yang berkualitas

4. Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

- 1). Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan, meliputi :
 - a. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat
 - b. Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak
 - c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - d. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis

5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

- 1). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi, meliputi :
 - a. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
 - b. Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi
 - c. Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah
 - d. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, maka Dinas Perikanan akan mendukung pelaksanaan misi sebagai bentuk tanggungjawab pendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan terutama pada Misi ke-2 yakni pada “Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan”.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1. Tantangan

- 1) Masih maraknya illegal fishing yang mengancam pelestarian sumberdaya perikanan;
- 2) Masih kurangnya pemanfaatan lahan yang berpotensi untuk pengembangan perikanan budidaya karena kurangnya pengetahuan tentang cara budidaya ikan yang baik terutama untuk ikan-ikan lokal;
- 3) Tingkat kesadaran nelayan pengguna alat tangkap yang ramah lingkungan relatif rendah;
- 4) Rendahnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

2. Peluang

- 1) Tersedianya potensi sumberdaya alam yang mendukung pengembangan perikanan tangkap dan budidaya
- 2) Kebijakan pemerintah dalam mendukung pengadaan sarana dan prasarana pembudidayaan usaha kecil masyarakat perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2019, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
3.01.3.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	82	582.533.000	3.01.3.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Tingkat Kepuasan Pelayanan	100	582.533.000
3.01.3.01.01.01.01	Penyedian Jasa dan administrasi kantor	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	39.680.350	3.01.3.01.01.01.01	Penyedian Jasa dan administrasi kantor	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	39.680.350
3.01.3.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	32.820.000	3.01.3.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	32.820.000
3.01.3.01.01.01.04	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	14.000.000	3.01.3.01.01.01.04	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	14.000.000
3.01.3.01.01.01.06	Penyediaan makan dan minum	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	24.975.000	3.01.3.01.01.01.06	Penyediaan makan dan minum	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	24.975.000
3.01.3.01.01.01.07	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	160.450,000	3.01.3.01.01.01.07	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	160.450,000
3.01.3.01.01.01.09	Rapat rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	310.607.650	3.01.3.01.01.01.09	Rapat rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	310.607.650
3.01.3.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	82	284.376.745	3.01.3.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	Tingkat Kepuasan Pelayanan	100	284.376.745
3.01.3.01.01.02.14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	13 jenis	87.320.745	2.05.2.05.02.22	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	1 tahun	87.320,745
3.01.3.01.01..02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional kondisi baik	28 unit	93.656,000	2.05.2.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	1 tahun	93,656,000
3.01.3.01.01..02.31	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Jumlah gedung/kantor dengan kondisi baik	2 buah	103.400.000	3.01.3.01.01..02.31	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	1 tahun	103.400.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
3.01.3.01.01.07	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP; Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen Keuangan Daerah	81,89 Nilai;100 %	9.750.000	3.01.3.01.01.07	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP; Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen Keuangan Daerah	81,89 Nilai;100 %	9.750.000
3.01.3.01.01.07.07	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Dokumen keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 dokumen	4.875.000	3.01.3.01.01.07.07	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Dokumen keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 dokumen	4.875.000
3.01.3.01.01.07.08	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 dokumen	4.875.000	3.01.3.01.01.07.08	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 dokumen	4.875.000
3.01.3.01.01.10	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	Indeks Kepuasan Pelayanan	82	88.084.100	3.01.3.01.01.10	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	Tingkat Kepuasan Pelayanan	100	88.084.100
3.01.3.01.01.10.33	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	Pelayanan perangkat daerah sesuai standar	1 Tahun	88.084.100	3.01.3.01.01.10.33	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	Pelayanan perangkat daerah sesuai standar	1 Tahun	88.084.100
3.01.3.01.01.03	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Kabupaten	Poduksi perikanan budidaya	4,791 Ton	775.780.000	3.01.3.01.01.03	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Kabupaten	Poduksi perikanan budidaya	4,791 Ton	775.780.000
3.01.3.01.01.03.01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Kabupaten	Jumlah benih ikan yang tersedia	650.000 ekor	103.150.000	3.01.3.01.01.03.01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Kabupaten	Jumlah benih ikan yang tersedia	607.500 ekor	103.150.000
3.01.3.01.01.03.02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Sungai Raya, Padang Batung, Daha Utara	Jumlah luasan media budidaya	0.12 Ha	178.295.000	3.01.3.01.01.03.02	Pengembangan Perikanan Sarana dan prasarana budidaya perikanan	Sungai Raya, Daha Utara, Padang batung	Jumlah luasan media budidaya	0.12 Ha	178.295.000
3.01.3.01.01.03.03	Budidaya Ikan Air Tawar	Padang Batung, Daha Utara	Jumlah benih ikan yang ditebar	230,000 ekor	335,200,000	3.01.3.01.01.03.03	Budidaya Ikan Air Tawar	Padang Batung, daha Utara	Jumlah benih ikan yang ditebar	230,000 ekor	335,200,000
3.01.3.01.01.03.04	Pengelolaam kesehatan ikan dan lingkungan	SKPD	Jumlah pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan	3 sampel	14.625.000	3.01.3.01.01.03.04	Pengelolaam kesehatan ikan dan lingkungan	SKPD	Jumlah pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan	3 sampel	14.625.000
3.01.3.01.01.03.05	Pelatihan Budidaya Perikanan	Kabupaten	Jumlah pelatihan budidaya perikanan	4 kali	25.860.000	3.01.3.01.01.03.05	Pelatihan Budidaya Perikanan	Kabupaten	Jumlah pelatihan budidaya perikanan	4 kali	25.860.000
-	-	-	-	-	-	3.01.3.01.01.03.08	Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)	Padang Batung, Kandangan	Jumlah benih yang ditebar	10.000 ekor	118.650.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
3.01.3.01.01.04	Program Peningkatan produksi perikanan tangkap		Produksi perikanan tangkap	9.579 Ton	980.975.000	2.05.2.27.04	Program Peningkatan produksi perikanan tangkap		Produksi perikanan tangkap	9.579 Ton	980.975.000
3.01.3.01.01.02	Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Kabupaten	Jumlah nelayan yang mendapat sosialisasi	150 orang	19.854.000	3.01.3.01.01.02	Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Kabupaten	Jumlah nelayan yang mendapat sosialisasi	150 orang	19.854.000
3.01.3.01.01.04	Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	Kandangan, Kalumpang, Daha Utara, Daha Selatan, Daha Barat	Persentase jumlah kasus pelanggaran illegal fishing yang ditindaklanjuti	100 %	273.590.000	3.01.3.01.01.04	Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	Kandangan, Kalumpang, Daha Utara, Daha Selatan, Daha Barat	Persentase jumlah kasus pelanggaran illegal fishing yang ditindaklanjuti	100 %	338.690.000
3.01.3.01.01.06	Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap (DAK)	Daha Selatan, Daha Barat, Kandangan	-Jumlah kapal yang refresentatif	55 unit	986.975.000	3.01.3.01.01.06	Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap (DAK)	Daha Selatan, Daha Barat, Kandangan	-Jumlah kapal yang refresentatif	55 unit	986.975.000
3.01.3.01.01.501	Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	Daha Utara, Daha Selatan, Daha Barat, Kandangan, Simpur	-Jumlah kapal yang refresentatif - Jumlah alat tangkap yang refresentatif	15 unit 600 unit	324.950.000	3.01.3.01.01.501	Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	Daha Utara, Daha Selatan, Daha Barat, Kandangan, Simpur	-Jumlah kapal yang refresentatif - Jumlah alat tangkap yang refresentatif	15 unit 600 unit	253.850.000
3.01.3.01.01.101	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	3%	27.900.000	3.01.3.01.01.101	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	3%	27.900.000
3.01.3.01.01.101.01	Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Kabupaten	Jumlah pelaku usaha yang menggunakan teknologi hasil perikanan	9 orang	8.250.000	3.01.3.01.01.101.01	Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Kabupaten	Jumlah pelaku usaha yang menggunakan teknologi hasil perikanan	9 orang	8.250.000
3.01.3.01.01.101.02	Pemasaran dan Invstasi Hasil Perikanan	Kabupaten	Jumlah event promosi perikanan yang dilaksanakan	1 kali	7.750.000	3.01.3.01.01.101.02	Pemasaran dan Invstasi Hasil Perikanan	Kabupaten	Jumlah event promosi perikanan yang dilaksanakan	1 kali	7.750.000
3.01.3.01.01.101.03	Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten	Jumlah sarana pemasaran hasil perikanan yang tersedia	2 unit	11.900.000	3.01.3.01.01.101.03	Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten	Jumlah sarana pemasaran hasil perikanan yang tersedia	2 unit	11.900.000
3.01.3.01.01.03	Program peningkatan kesejahteraan petani ikan	Kabupaten	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	1%	16.551.600	2.05.2.27.02	Program peningkatan kesejahteraan petani ikan	Kabupaten	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	1%	16.551.600
3.01.3.01.01.03.01	Pelatihan petani ikan/nelayan dan pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan	Kabupaten	Jumlah petani/nelayan/pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan	70 orang	16.551.600	3.01.3.01.01.03.01	Pelatihan petani ikan/nelayan dan pelaku agribisnis perikanan	Kabupaten	Jumlah petani/nelayan/pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan	70 orang	16.551.600
		Total			3.384.344.445						3.384.344.445

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Forum SKPD merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Kegiatan Musrenbang Kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang tata cara penyelenggaranya difasilitasi oleh SKPD terkait.

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah Forum SKPD. Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial.

Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dengan Draf Rencana Kerja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor.

Dinas Perikanan telah melaksanakan acara forum SKPD untuk menghimpun dan mensinergikan usulan-usulan kegiatan, baik yang berasal dari Bottom up maupun Top down. Setelah dilakukan analisis kesesuaian usulan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan semuanya memiliki kesamaan, sehingga dimungkinkan dapat dilaksanakan sepenuhnya apabila mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Proses selanjutnya, usulan-usulan tersebut kemudian di skala prioritaskan berdasarkan tingkat ketergesaan pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan masyarakat. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2019 di bidang perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Volume
1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap - Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kapal yang reprezentatif - Jumlah alat tangkap yang reprezentatif 	Kec. Daha Utara Kec. Daha Selatan Kec. Daha Barat Kec. Kandangan Kec. Simpur	15 unit 600 unit
2	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya - Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan - Budidaya Ikan Air Tawar	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah luasan media budidaya - Jumlah benih yang ditebar 	Padang Batung Simpur Telaga Langsat, Padang Batung, Loksado, Kandangan, Sungai Raya	2 buah rehab kolam, 10 kolam terpal 20 buah hapa 230.000 ekor
3	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelaku usaha yang menggunakan teknologi hasil perikanan 	Daha Selatan	2 buah peti Pendingin dan Hand Sealer

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2017 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan dengan revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan yang berkualitas, dan pembangunan perumahan dan permukiman.

2. Pembangunan Sektor Unggulan

Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan terutama dengan pembangunan konektivitas laut dan industry maritim, pengembangan kawasan pariwisata dan percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK).

3. Pemerataan dan Kewilayahan

Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan

perdesaan dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agraria.

4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan

Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan diarahkan untuk konsolidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan penegakan hukum, reformasi birokrasi.

5. Pembangunan Ekonomi

Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kerja Dinas Perikanan

Hubungan yang selaras antara Renja dan Rentra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Tahun 2018-2023 yaitu:

a. Tujuan

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatkan persentase petumbuhan sektor perikanan dalam PDRB.

b. Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
2. Meningkatnya persentase petumbuhan sektor perikanan dalam PDRB.

3.3 Program dan Kegiatan Renja Kerja Dinas Perikanan

Program dan kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2019 direncanakan berjumlah 8 Program dan 26 kegiatan dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 3.380.644.445 dengan 2 kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.1.105.625.000.

Tabel 3.1. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2019

No	Program	Pagu Indikatif
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	578.833.000
	1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	39.680.350
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.820.000
	3. Penyebarluasan informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	14.000.000
	4. Penyediaan makanan dan minuman	24.975.000
	5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	156.750.000
	6. Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	310.607.650

No	Program	Pagu Indikatif
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	284.376.745
	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	87.320.745
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	93.656.000
	3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	103.400.000
3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.750.000
	1. Penyusunan Dokumen Keuangan	4.875.000
	2. Penyusunan Dokumen AKIP	4.875.000
4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	88.084.100
	1. Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	88.084.100
5	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	24.880.000
	1. Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	8.250.000
	2. Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	7.750.000
	3. Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	11.900.000
6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	16.551.600
	1. Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan Pelaku Agribisnis Perikanan	16.551.600
7	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	775.780.000
	1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul	103.150.000
	2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	178.295.000
	3. Budidaya Ikan Air Tawar	335.200.000
	4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	14.625.000
	5. Pelatihan Budidaya Perikanan	25.860.000
	6. Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)	118.650.000
8	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.599.369.000
	1. Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	19.854.000
	2. Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	338.689.000
	3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	253.850.000
	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap (DAK)	986.975.000
	Jumlah	3.380.644.445

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Sejalan dengan kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 yang dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), berdasarkan Nawa Cita ke-4 Pemberantasan perikanan illegal dan Nawa Cita ke-7 Peningkatan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan maka Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 telah menetapkan proyeksi peningkatan produksi perikanan pada tahun 2023 dengan target sebesar 20.639 Ton dalam rangka upaya peningkatan persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan, dengan strategi :

- a. mengembangkan usaha budidaya perikanan dan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,
- b. menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya perikanan,
- c. mengembangkan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk peningkatan kesejahteraan nelayan

7. Kebijakan

Kebijakan pembangunan sektor perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada pendekatan pembangunan yang diarahkan agar mampu memainkan peranan utama dalam perbaikan perekonomian daerah, dalam arti Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap

- a. Peningkatan sosialisasi pelestarian sumberdaya perikanan
- b. Peningkatan sarana prasarana pengawasan sumberdaya perikanan dan koordinasi dengan instansi terkait
- c. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap di perairan umum

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Berdasarkan Kebijakan Prioritas Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah diselaraskan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana terakomodir dalam tujuan dan sasaran Dinas Perikanan.

Pada Tahun 2019 Dinas Perikanan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2019 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nama SKPD : Dinas Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
-																			
0.00.00 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									630,720,500	578,833,000	(51,887,500)							
0.00.00 1.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Pelayanan administrasi sesuai standar	-	-	SKPD	SKPD	1tahun	1tahun	46,080,850	39,680,350	(6,400,500)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0tahun	39,680,350	berjalan	Dinas Perikanan	
0.00.00 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	Pelayanan administrasi sesuai standar	-	-	SKPD	SKPD	1tahun	1tahun	34,020,000	32,820,000	(1,200,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0tahun	32,820,000	berjalan	Dinas Perikanan	
0.00.00 1.4	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Pelayanan administrasi sesuai standar	-	-	SKPD	SKPD	1tahun	1tahun	14,000,000	14,000,000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0tahun	14,000,000	berjalan	Dinas Perikanan	
0.00.00 1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	Pelayanan administrasi sesuai standar	-	-	SKPD	SKPD	1tahun	1tahun	31,350,000	24,975,000	(6,375,000)	-	-	0tahun	24,975,000	berjalan	Dinas Perikanan	
0.00.00 1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Pelayanan administrasi sesuai standar	Pelayanan administrasi sesuai standar	-	-	SKPD	SKPD	1tahun	1tahun	114,850,000	156,750,000	41,900,000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0tahun	156,750,000	berjalan	Dinas Perikanan	

0.00..00 1.9	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Pelayanan administrasi sesuai standar	-	-	Telaga Langsat, Daha Utara, Kandangan, Padang Batung, Angkinang, Sungai Raya, Daha Selatan, Kalumpang, Loksado, Simpur, Daha Barat	Telaga Langsat, Daha Utara, Kandangan, Padang Batung, Angkinang, Sungai Raya, Daha Selatan, Kalumpang, Loksado, Simpur, Daha Barat	1 tahun	1 tahun	390,419,650	310,607,650	(79,812,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	310,607,650	berjalan	Dinas Perikanan
0.00..00 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									357,699,745	284,376,745	(73,323,000)						
0.00..00 2.14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	-	-	SKPD	SKPD	13 jenis	1 tahun	142,643,745	87,320,745	(55,323,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 jenis	87,320,745	berjalan	Dinas Perikanan
0.00..00 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasi onal kondisi baik	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	-	-	SKPD	SKPD	28 unit	1 tahun	96,656,000	93,656,000	(3,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 unit	93,656,000	berjalan	Dinas Perikanan
0.00..00 2.31	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah gedung/kant or dengan kondisi baik	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	-	-	SKPD	SKPD	2 buah	1 tahun	118,400,000	103,400,000	(15,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 buah	103,400,000	berjalan	Dinas Perikanan
0.00..00 7	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									10,000,000	9,750,000	(250,000)						
0.00..00 7.7	Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	-	-	SKPD	SKPD	12 dokumen keuangan	12 dokumen keuangan	5,000,000	4,875,000	(125,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 dokumen keuangan	4,875,000	berjalan	Dinas Perikanan
0.00..00 7.8	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	-	-	SKPD	SKPD	15 dokumen AKIP	15 dokumen AKIP	5,000,000	4,875,000	(125,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 dokumen AKIP	4,875,000	berjalan	Dinas Perikanan
0.00..01 0	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah									53,860,000	88,084,100	34,224,100						
0.00..01 0.33	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan perangkat daerah sesuai standar	-	-	Kabupaten	Kabupaten, Loksado	1 tahun	1 tahun	53,860,000	88,084,100	34,224,100	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	88,084,100	berjalan	Dinas Perikanan
Kelautan dan Perikanan																		

2.27.00	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan										83,957,500	27,900,000	(56,057,500)					
2.27.00 1.1	Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha yang menggunakan teknologi hasil perikanan	Jumlah pelaku usaha yang menggunakan teknologi hasil perikanan	-	-	Kabupaten	Kabupaten	9 orang	9 orang	34,207,500	8,250,000	(25,957,500)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 orang	berjalan	Dinas Perikanan	
2.27.00 1.2	Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	Jumlah event dan promosi perikanan yang dilaksanakan; Jumlah event dan promosi perikanan yang dilaksanakan	Jumlah event dan promosi perikanan yang dilaksanakan	-	-	Kabupaten	Kabupaten	1 kali;1 kali	1 kali	12,350,000	7,750,000	(4,600,000)	-	-	0 kali	7,750,000	berjalan	Dinas Perikanan
2.27.00 1.3	Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah sarana pemasaran hasil perikanan yang tersedia	Jumlah sarana pemasaran hasil perikanan yang tersedia	-	-	Kabupaten	Kabupaten	152 unit	152 unit	30,200,000	11,900,000	(18,300,000)	-	-	0 unit	11,900,000	berjalan	Dinas Perikanan
2.27.00 1.4	Penyusunan Laporan Harga Ikan	Laporan Data Pemasaran Ikan	Laporan Data Pemasaran Ikan	-	-	Kabupaten	Kabupaten	12 laporan	12 laporan	7,200,000	-	(7,200,000)	-	-	0 laporan	-	berjalan	Dinas Perikanan
2.27.00	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan										16,966,200	16,551,600	(414,600)					
2.27.00 2.1	Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan pelaku agribisnis perikanan	Jumlah petani ikan/nelayan/pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan	Jumlah petani ikan/nelayan/pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan	-	-	Kabupaten	Kabupaten	70 orang	70 orang	16,966,200	16,551,600	(414,600)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 orang	16,551,600	berjalan	Dinas Perikanan
2.27.00	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya										1,010,480,000	775,780,000	(234,700,000)					
2.27.00 3.1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul		Jumlah benih yang ditebar	-	Pokdakan		Kandangan, Padang Batung		10.000 ekor	-	118,650,000	118,650,000		APBN (DAK)	0 ekor	118,650,000	baru	Dinas Perikanan
2.27.00 3.1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah bibit ikan	Jumlah bibit ikan	-	-	Kabupaten	Kabupaten	650.000 ekor	650.000 ekor	145,550,000	103,150,000	(42,400,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 ekor	103,150,000	berjalan	Dinas Perikanan
2.27.00 3.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Jumlah luasan budidaya	Jumlah luasan budidaya (0.12)	-	-	Kabupaten, Sungai Raya, Padang Batung, Daha Utara	Sungai Raya, Padang Batung, Daha Utara	12 Ha	0 Ha	435,525,000	178,295,000	(257,230,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Ha	178,295,000	berjalan	Dinas Perikanan

2.27.00 3.3	Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah benih yang ditebar	Jumlah benih yang ditebar	-	-	Kabupaten, Padang Batung, Daha Utara	Padang Batung, Telaga Langsat, Loksado, Sungai Raya, Kandangan	230.000 ekor	230.000 ekor	367,050,000	335,200,000	(31,850,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 ekor	335,200,000	berjalan	Dinas Perikanan
2.27.00 3.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan	Jumlah pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan	-	-	SKPD	SKPD	3 sampel	3 sampel	26,225,000	14,625,000	(11,600,000)	-	-	0 sampel	14,625,000	berjalan	Dinas Perikanan
2.27.00 3.5	Pelatihan Budidaya Perikanan	Jumlah pelatihan budidaya perikanan	Jumlah petani pembudidaya ikan yang memiliki kompetensi	-	-	Kabupaten	Kabupaten	4 kali	90 orang	36,130,000	25,860,000	(10,270,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 orang	25,860,000	berjalan	Dinas Perikanan
2.27.00 3.7	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	-	-	Kabupaten	Kabupaten	4.791 Ton	4.791 Ton	-	-	-	APBN (DAK)	APBN (DAK)	0 Ton	-	berjalan	Dinas Perikanan
2.27.00 4	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap								972,150,000	1,599,369,000	627,219,000							
2.27.00 4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap		Jumlah kapal yang layak operasi	-	KUB		Daha Selatan, Daha Barat, Kandangan		55 unit	-	986,975,000	986,975,000		APBN (DAK)	0 unit	986,975,000	baru	Dinas Perikanan
2.27.00 4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah alat tangkap yang representatif	Jumlah kapal yang representatif	-	-	Kabupaten, Simpur, Daha Barat, Daha Utara, Kandangan, Daha Selatan, Kalumpang	Kabupaten, Simpur, Daha Barat, Daha Utara, Kandangan, Daha Selatan, Kalumpang	600 unit	15 unit	442,850,000	253,850,000	(189,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 unit	253,850,000	berjalan	Dinas Perikanan
2.27.00 4.2	Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah KUB yang dibina	Jumlah nelayan yang mengikuti sosialisasi	-	-	Kabupaten	Kabupaten	64 KUB	150 orang	6,100,000	19,854,000	13,754,000	-	-	0 orang	19,854,000	berjalan	Dinas Perikanan
2.27.00 4.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Perikanan	Jumlah kapal pengawasan perikanan	Jumlah kapal pengawasan perikanan	-	-	Simpur	Simpur	2 unit	2 unit	40,000,000	-	(40,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 unit	-	berjalan	Dinas Perikanan

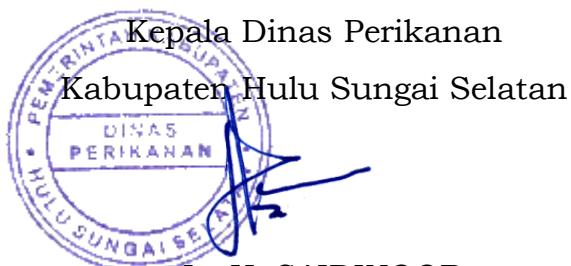
2.27.00 4.4	Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	Percentase jumlah kasus pelanggaran illegal fishing yang ditindaklanjuti	Percentase jumlah kasus pelanggaran illegal fishing yang ditindaklanjuti	-	-	Kabupaten, Kandangan, Daha Selatan, Kalumpang, Daha Barat, Daha Utara	Kandangan, Kandangan, Daha Selatan, Kalumpang, Daha Barat, Daha Utara	100%	100%	469,700,000	338,690,000	(131,010,000)	-	-	0%	338,690,000	berjalan	Dinas Perikanan
2.27.00 4.5	Restocking Perairan Umum	Jumlah ikan yang ditebar di perairan umum	Jumlah ikan yang ditebar di perairan umum	-	-	Kabupaten	Kabupaten	10.000 ekor	10.000 ekor	13,500,000	-	(13,500,000)	-	-	0 ekor	-	berjalan	Dinas Perikanan
JUMLAH									3,135,833,945	3,380,644,445	244,810,500					3,380,644,445		

BAB V. PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2019. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perikanan tahun 2019 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Perikanan serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Kandangan, Juli 2019



Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Ir. H. SAIDINOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 19641215 199312 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PERIKANAN**

Jalan Melati No : 14 Kandangan
Telp. (0517) 21094 Fax. (0517) 21094

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguann Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019**

- PERTAMA : Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Dinas Perikanan sebagaimana terdapat dalam Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Renja Dinas Perikanan sebagaimana dalam diktum Pertama berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perikanan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 22 Juli 2019



Ir. H. SAIDINOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 19641215 199312 1 002



